JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 4, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA PAHARANGAN KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Helma[1], Agus Syabani Arlan[2], Jumadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: helmatlb13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Program ini penting karena merupakan strategi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan produktif skala mikro bagi ibu rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi penyuluh KB, anggota UPPKA, dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program cukup efektif dalam meningkatkan peran serta perempuan di bidang ekonomi. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan modal, kurangnya pelatihan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Berdasarkan teori Warwick, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi, ketersediaan informasi, dukungan eksternal, dan distribusi potensi. Kesimpulannya, UPPKA berkontribusi positif terhadap kemandirian ekonomi perempuan dan kesejahteraan keluarga, meskipun masih membutuhkan penguatan kebijakan, pelatihan, serta pendampingan berkelanjutan agar lebih optimal.
Kata Kunci: UPPKA, pemberdayaan perempuan, implementasi program.

ABSTRACT

This study explores the implementation of the Family Income Improvement Program for Acceptors (UPPKA) as a strategy for empowering women in Paharangan Village, Daha Utara Sub-district, Hulu Sungai Selatan Regency. The program targets housewives through micro-scale economic activities aimed at improving household welfare. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Key informants included family planning officers, members of UPPKA groups, and village authorities. Findings reveal that UPPKA has been relatively successful in promoting women's involvement in income-generating initiatives. Nonetheless, challenges persist, such as limited access to capital, insufficient skills training, and weak coordination among relevant institutions. Applying Warwick's theoretical framework, the study identifies four influencing factors: organizational capacity, information availability, support systems, and authority distribution. Overall, UPPKA demonstrates a positive impact on women's economic independence and family welfare. However, to ensure sustainable outcomes, ongoing policy support, practical training, and structured mentoring are essential.
Keywords: *UPPKA, women empowerment, program implementation.*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam strategi pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia, perempuan memainkan peran krusial dalam ekonomi rumah tangga, namun pada kenyataannya masih banyak perempuan, khususnya ibu rumah tangga, yang belum mampu berkontribusi secara optimal karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan

keterampilan, modal usaha, dan kesempatan kerja. Ketimpangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam sektor ketenagakerjaan formal juga masih tinggi. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa selama periode 2021 hingga 2024, persentase tenaga kerja formal perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki, yakni sekitar 35–36%, sementara laki-laki berada pada kisaran 43–45%.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merancang Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga. Program ini menargetkan perempuan, khususnya akseptor program keluarga berencana (KB), agar dapat mandiri secara ekonomi melalui kegiatan produktif skala mikro. Tujuannya tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mendukung keberhasilan program KB serta memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan komunitas.

Program UPPKA telah dijalankan di berbagai daerah termasuk di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memiliki 19 Kampung KB, salah satunya di Desa Paharangan. Di desa ini, program UPPKA terimplementasi melalui kelompok UPPKA "Maju Bersama" yang fokus pada usaha pengolahan kue basah dan catering. Desa Paharangan sendiri memiliki potensi yang cukup besar, terutama karena sebagian besar penduduknya adalah petani dan ibu rumah tangga yang belum memiliki penghasilan tetap. Namun, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal, mengingat keterbatasan keterampilan, akses modal, dan pendampingan yang mereka hadapi.

Fakta ini menggambarkan perlunya intervensi strategis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program UPPKA di tingkat desa. Sejumlah studi sebelumnya telah meneliti implementasi program serupa di berbagai daerah. Rosa Fina Andi Kirani (2023) dalam penelitiannya di Desa Panggungkalak, Tulungagung, menemukan bahwa program UPPKA dapat meningkatkan kapasitas diri perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Faktor internal seperti semangat dan kesadaran diri, serta dukungan eksternal dari pemerintah dan keluarga, menjadi penentu keberhasilan. Sementara itu, Eny Eka Zahidatur Rohmah (2016) mengungkapkan bahwa program UPPKS di Kabupaten Malang belum memberikan dampak signifikan meskipun sudah berjalan lama, akibat minimnya perhatian terhadap evaluasi hasil dan kelanjutan program.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, implementasi Program UPPKA di Desa Paharangan menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat desa ini memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program UPPKA dapat berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan di Desa Paharangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berbasis keluarga di tingkat lokal dan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam terkait implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana program UPPKA dijalankan dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik dari segi dukungan, kemampuan organisasi, informasi, maupun pembagian potensi sebagaimana dikaji berdasarkan teori implementasi dari Warwick.

Sasaran penelitian ini mencakup para pelaksana program, seperti penyuluh keluarga berencana, anggota kelompok UPPKA Maju Bersama, serta aparat desa setempat yang berperan dalam mendukung kegiatan kelompok. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program.

Data dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan kelompok UPPKA, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh informasi secara komprehensif, serta dokumentasi yang mendukung keabsahan data seperti laporan kegiatan, arsip kelompok, dan catatan dari pihak desa maupun instansi terkait.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Setiap data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk memahami pola pelaksanaan program, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan. Validitas data diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber dan teknik guna memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Kemampuan Organisasi

a. Kemampuan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelatihan bagi kader UPPKS di Desa Paharangan dinilai sudah cukup baik. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah meningkatkan kemampuan teknis kader, sehingga program UPPKA dapat dijalankan secara efektif.

Temuan ini sejalan dengan teori Warwick (2015:70) tentang pentingnya peningkatan kapasitas, serta didukung oleh penelitian Rosa Fina Andi Kirani (2023) yang menyoroti peran pelatihan dalam memperkuat keterampilan teknis kader UPPKA guna mendukung keberhasilan program.

b. Koordinasi

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan perlunya penegasan kembali peran kader, penguatan pengawasan, serta evaluasi rutin agar pelaksanaan SOP Program UPPKA berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan.

Hal ini sejalan dengan teori Warwick (Kaji, 2015:70) mengenai pentingnya prosedur operasional standar. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Rosa Fina Andi Kirani (2023) yang menekankan pentingnya pelaksanaan SOP, pembagian tugas yang terstruktur, dan pengawasan dalam pelaksanaan program UPPKA di Desa Panggungkalak.

c. *Standard Operating Procedure* (SOP)

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan perlunya penegasan kembali peran kader, penguatan pengawasan, serta evaluasi rutin agar pelaksanaan SOP Program UPPKA berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan.

Hal ini sejalan dengan teori Warwick (Kaji, 2015:70) mengenai pentingnya prosedur operasional standar. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Rosa Fina Andi Kirani (2023) yang menekankan pentingnya pelaksanaan SOP, pembagian tugas yang terstruktur, dan pengawasan dalam pelaksanaan program UPPKA di Desa Panggungkalak.

2. Informasi

a. Penyaluran Informasi

Kesimpulan Hasil wawancara dan observasi Penyebaran informasi Program UPPKA di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, dilakukan secara terstruktur melalui pertemuan, penyuluhan, dan pengumuman, dengan keterlibatan aktif kader dan warga. Strategi ini terbukti membantu pencapaian tujuan program secara optimal.

Temuan ini mendukung teori Warwick (Kaji, 2015:70) mengenai pentingnya penyaluran informasi dalam pemberdayaan. Meskipun berbeda fokus, hasil ini melengkapi penelitian Kirani yang menyoroti dampak program, sementara penelitian ini menekankan pada proses penyampaian informasi agar program diterima oleh masyarakat.

b. Kejelasan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa program UPPKA di Desa Paharangan telah berjalan dengan cukup baik berkat adanya kolaborasi antara kader pelaksana dan pemerintah desa. Meskipun program ini dinilai efektif, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti sebagian warga yang mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian informasi perlu disempurnakan, baik dari segi media maupun metode penyampaiannya, agar manfaat program dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara merata. Pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap latar belakang masyarakat lokal menjadi penting dalam upaya peningkatan pemahaman. Selain itu, pelatihan berkelanjutan kepada kader juga diperlukan guna memperkuat kapasitas penyuluhan yang lebih interaktif.

Dengan demikian, penyampaian informasi di Desa Paharangan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Warwick (Kaji, 2015:70), yang menekankan pentingnya efektivitas komunikasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian terdahulu oleh Eny Eka Zahidatur Rohmah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)". Dalam penelitian tersebut, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kejelasan informasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan.

3. Dukungan

a. Sikap masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Paharangan menunjukkan dukungan yang kuat serta sikap yang positif terhadap pelaksanaan Program UPPKA. Dukungan ini muncul karena masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari program tersebut, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas lingkungan sekitar.

Namun, sikap masyarakat ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan dalam teori Warwick (Kaji, 2015:70), yang menekankan bahwa perubahan sikap masyarakat terhadap suatu program membutuhkan waktu dan proses yang bertahap. Dalam konteks ini, antusiasme dan dukungan yang langsung muncul menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program UPPKA di Desa Paharangan justru terjadi secara lebih cepat.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Eny Eka Zahidatur Rohmah (2016) berjudul "Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)", yang menunjukkan bahwa Program UPPKA efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian tersebut, sikap positif masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program, sebagaimana yang juga terjadi di Desa Paharangan.

b. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Paharangan yang aktif berpartisipasi dalam program UPPKA merasakan dampak positif yang signifikan. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang pemberdayaan perempuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan wirausaha yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain menjadi penerima manfaat, masyarakat juga turut berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam membentuk komunitas yang lebih harmonis, sehat, dan mandiri.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pelaksanaan program. Masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang peduli atau bersikap pasif, sehingga partisipasi belum merata. Kondisi ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan strategi komunikasi yang inklusif agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat secara efektif.

Dengan demikian, ketidaksesuaian dengan teori Warwick (Kaji, 2015:70) terlihat dari aspek partisipasi yang belum menyeluruh, yang seharusnya menjadi bagian integral dari keberhasilan implementasi program. Ketidaksesuaian ini juga tampak jika dibandingkan dengan hasil penelitian Eny Eka Zahidatur Rohmah (2016) yang berjudul "Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)". Dalam penelitian tersebut, partisipasi masyarakat lebih merata dan sosialisasi dilakukan secara efektif, berbeda dengan kondisi di Desa Paharangan yang menunjukkan masih lemahnya keterlibatan sebagian masyarakat dan kurangnya peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh.

4. Sikap Pelaksana

1) Komitmen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komitmen para pelaksana program di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat kesepahaman dan kerja sama yang solid di antara pihak-pihak terkait dalam mendorong kemajuan desa. Setiap jabatan desa menjalankan tugas dan wewenangnya secara jelas, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa, sehingga pelaksanaan

program berjalan dengan penuh tanggung jawab. Komitmen ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program di tingkat lokal.

Namun demikian, implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan teori Warwick (Kaji, 2015:70) yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang stabil, distribusi kewenangan yang merata, dan efektivitas pelaksana dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rosa Fina Andi Kirani (2023), yang berjudul "Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus di Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)". Dalam penelitian tersebut, fokus pelaksanaan program turut membahas isu-isu seperti eksploitasi anak, sedangkan di Desa Paharangan perhatian lebih diberikan pada aspek struktural dan tanggung jawab formal berdasarkan SK Kepala Desa.

2) Tanggung Jawab (Fragmentasi)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komitmen pelaksana dalam membina kader dan menjalankan program UPPKA di Desa Paharangan telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari kegiatan pembinaan bulanan, monitoring rutin, serta penanganan kendala teknis seperti keterlambatan input data.

Namun demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya mencerminkan teori Warwick (Kaji, 2015:70), yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang stabil, pembagian tanggung jawab yang proporsional, serta kapasitas pelaksana dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil temuan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah kader, tingginya angka pergantian kader, dan kesenjangan dalam penguasaan teknologi di antara pelaksana program. Hal ini juga tidak sejalan dengan temuan Eny Eka Zahidatur Rohmah (2016) dalam penelitiannya berjudul Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang) yang menunjukkan pelaksanaan program berjalan lebih stabil dan terkoordinasi.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program UPPKA di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Faktor pendukung

a. Kemampuan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan program UPPKA di Kecamatan Daha Utara berlangsung cukup baik. Para kader memperoleh pelatihan rutin setiap bulan, baik secara daring maupun luring, dengan materi seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kerja sama tim. Koordinasi antara koordinator PKB, pihak desa, dan

kader terjalin melalui rapat, grup WhatsApp, serta komunikasi langsung, ditunjang struktur organisasi yang jelas dan pemanfaatan teknologi informasi. Monitoring dan evaluasi rutin turut menjaga keaktifan kader, sementara dukungan dari ketua PKB dan pembina kecamatan memperkuat pelaksanaan program.

Kondisi ini sejalan dengan teori kemampuan organisasi yang dikemukakan oleh Warwick (Kaji, 2015:70), serta diperkuat oleh penelitian Rosa Fina Andi Kirani (2023) berjudul *Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus di Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)*, yang menyoroti pentingnya faktor pendukung dalam keberhasilan program.

b. Informasi

Hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Daha Utara menunjukkan bahwa informasi program UPPKA disampaikan melalui berbagai cara, baik langsung maupun daring, seperti sosialisasi, media sosial, kunjungan rumah, dan penyebaran brosur dari BKKBN. Kader yang telah dibina berperan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meski partisipasi masyarakat masih rendah, penyampaian informasi dinilai cukup efektif karena materinya relevan dan mudah dipahami.

Temuan ini sejalan dengan teori Warwick (Kaji, 2015:70), namun berbeda pendekatan dengan penelitian Eny Eka Zahidatur Rohmah (2016) yang menekankan penggunaan media berbeda dalam menyampaikan informasi program UPPKA.

c. Dukungan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program UPPKA di Kecamatan Daha Utara tergolong cukup baik dan aktif. Warga setempat ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, serta memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi mengenai perkembangan program. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan saran konstruktif untuk pengembangan program. Meskipun terdapat tantangan dalam mendorong kehadiran masyarakat secara lebih menyeluruh, secara umum program ini diterima dengan positif dan dinilai mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga. Temuan ini sejalan dengan teori Warwick (Kaji, 2015:70), namun tidak sepenuhnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Rosa Fina Andi Kirani (2023) yang berjudul *Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus di Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)*.

2. Faktor Penghambat

a. Kendala dalam *Standard Operating Procedure* (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program UPPKA di Kecamatan Daha Utara masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan terbatasnya dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini berimbas pada berkurangnya frekuensi pertemuan kader, yang pada akhirnya turut memengaruhi antusiasme mereka dalam menjalankan tanggung jawab. Selain itu, prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku mencakup berbagai tahapan, mulai dari proses pendaftaran, seleksi peserta, pelatihan, hingga tahapan pelaporan. Setiap kader diwajibkan menyusun laporan kegiatan bulanan dan menyerahkannya kepada pengelola program di tingkat desa. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan, keberadaan SOP yang terstruktur diharapkan mampu menunjang kelancaran pelaksanaan program dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b. Kendala dalam penyampaian informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan program UPPKA di Kecamatan Daha Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. Tingkat pemahaman yang beragam serta latar belakang pendidikan yang berbeda menyebabkan tidak semua informasi dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penyampaian yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik lokal agar program dapat berjalan secara optimal.

c. Ketidak tetapan tugas kader UPPKA di Desa Paharangan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama yang dialami para kader di Kecamatan Daha Utara mencakup rendahnya motivasi, minimnya penghargaan, kurangnya dukungan, terbatasnya pelatihan, serta belum memadainya fasilitas penunjang. Di samping itu, beban tugas yang tinggi, keterbatasan waktu, komunikasi yang kurang optimal, dan arah kerja yang tidak jelas turut memperburuk kondisi, hingga menyebabkan sejumlah kader memilih untuk mengundurkan diri. Dengan demikian, diperlukan bentuk dukungan yang lebih proaktif, tersusun secara sistematis, dan melibatkan kerja sama lintas pihak guna menjamin keberlangsungan serta efektivitas pelaksanaan program.

C. Upaya dalam mengatasi Implementasi Program UPPKA Di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kader serta pengelola program di Desa Paharangan, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Program UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Untuk mengatasi kendala

tersebut, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Studi Banding ke Desa yang Telah Berhasil Mengelola Program UPPKA

Melalui kegiatan studi banding, para kader memperoleh tambahan wawasan dan ide-ide segar yang dapat mendorong mereka untuk mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kondisi di Desa Paharangan. Aktivitas ini juga berfungsi sebagai media untuk memperluas jaringan serta berbagi pengalaman dengan pengelola UPPKA dari wilayah lain. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan melalui sinergi dan komunikasi bersama instansi yang berwenang, seperti BKKBN atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Meningkatkan Sosialisasi Melalui Media Informasi

Media informasi yang digunakan dirancang secara menarik dan komunikatif, serta menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyampaian pesan dilakukan melalui berbagai saluran, seperti poster, selebaran, serta media sosial yang populer di kalangan warga. Desain visual yang menarik juga diterapkan untuk meningkatkan minat dan daya tangkap masyarakat terhadap isi pesan. Selain itu, pemilihan kata disesuaikan dengan konteks budaya dan tingkat pendidikan masyarakat setempat, agar pesan lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

3. Menjaga Konsistensi dan Komitmen Kader atau Pengelola Kelompok

Tingginya frekuensi pergantian kader atau pengelola menjadi salah satu hambatan dalam menjaga kesinambungan program UPPKA. Untuk itu, dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Menjalin koordinasi yang intensif antara pengelola program, pemerintah desa, serta kader atau pengurus kelompok UPPKA.
2. Memastikan bahwa kader yang dipilih benar-benar memiliki komitmen dan minat dalam menjalankan program, dengan mempertimbangkan latar belakang dan ketersediaan waktu mereka.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi kader, khususnya dalam aspek manajemen usaha, administrasi keuangan, dan pemasaran.
4. Memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada kader atau pengelola yang aktif dan berkontribusi, misalnya dalam bentuk uang transportasi, piagam penghargaan, atau apresiasi dalam kegiatan desa.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi kader untuk tetap aktif dan konsisten dalam menjalankan program UPPKA secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Paharangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian ekonomi perempuan. Program ini berhasil mendorong keterlibatan ibu rumah tangga dalam kegiatan produktif, khususnya melalui Kelompok UPPKA "Maju Bersama" yang mengembangkan usaha katering kue basah. Secara umum, pelaksanaan program mengacu pada teori implementasi Warwick yang menitikberatkan pada empat indikator utama, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan sikap pelaksana.

Dari sisi kemampuan organisasi, kelompok telah menunjukkan struktur kerja yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam manajemen usaha dan tata kelola keuangan. Informasi mengenai program sudah mulai tersebar melalui media lisan dan digital, meskipun belum sepenuhnya merata dan mudah dipahami oleh semua anggota. Dukungan dari pemerintah desa dan penyuluh KB tersedia, tetapi terbatas dalam bentuk modal dan pelatihan lanjutan. Sementara itu, sikap pelaksana dan partisipasi anggota menunjukkan semangat yang cukup tinggi, meskipun partisipasi belum merata dan pembagian peran belum optimal.

Secara esensial, temuan penelitian menunjukkan bahwa program UPPKA memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan perempuan berbasis komunitas, asalkan ditopang oleh pendampingan yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aktivitas ekonomi kelompok, tetapi juga oleh sejauh mana perempuan diberikan ruang untuk tumbuh sebagai individu yang mandiri, percaya diri, dan berdaya dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anonim, 2013. Pengertian Implementasi. [online] Available at: https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-52-tahun-2009-tentang-perkembangan-kependudukan-dan-pembangunan-keluarga. [Accessed 10 Mar. 2021].

Anonim, 2014. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. [online] Available at: https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-52-tahun-2009-tentang-perkembangan-kependudukan-dan-pembangunan-keluarga [Accessed 10 Mar. 2021].

Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2018. Kampung KB Bersemarak Desa Paharangan. [online] Available at: https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14338/kampung-kb-bersemarak-desa-paharangan [Accessed 20 Jul. 2025].

Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2024. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). [online] Available at: https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6237/intervensi/985461/kelompok-usaha-peningkatan-pendapatan-keluarga-akseptor-uppka [Accessed 20 Jul. 2025].

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Kementerian Kesehatan RI, 2012. Petunjuk Teknis Kegiatan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Kirani, R.F.A., 2023. Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Skripsi. Universitas Tulungagung.

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Yusuf, M., 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan. Jakarta: Kencana.